

Analisis Wacana Kritis atas Opini Publik terhadap Kinerja Pemerintah dalam Survei Kawula17 2025

Critical discourse analysis on public opinion toward government performance in the Kawula17 2025 survey

Nova Azzahra Ramadhani*, Mochamad Arif Affandi, Fransiscus Xaverius Sri Sadewo

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* nova.22173@mhs.unesa.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

Public opinion surveys are widely used as indicators of governmental legitimacy. However, quantitative approaches often fail to capture the complex meanings embedded in public responses. This study highlights the importance of discourse analysis in interpreting survey data, particularly amid declining public trust in the Indonesian government during Q2 2025. This research applies Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) to secondary data from the Kawula17 Q2 2025 Survey. The analysis follows three dimensions: textual, discursive practice, and social practice, focusing on issues of corruption, economy, and gender legislation (RUU PPRT). Public opinion emerges as a discursive construction marked by ambivalence, symbolic resistance, and critique of power relations. Expressions like "death penalty for corruptors" and "the little people are suffering" reflect tensions between state narratives and citizens' lived realities. Public opinion is not neutral; it is shaped by social structures and dominant ideologies. CDA offers a critical lens to reinterpret political surveys as socially embedded texts.

Keywords

Critical discourse analysis; public opinion; political survey; power relations

Article History

Received: 2026-01-03
Accepted: 2026-01-18

Copyright © 2026, Azzahra Ramadhani et al.

Published by MAN 4 Kota Pekanbaru

DOI: [10.56113/takuana.v4i4.315](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.315)

1. PENDAHULUAN

Opini publik merupakan barometer vital bagi stabilitas dan legitimasi politik dalam sistem demokrasi modern (Sarihati et al., 2022). Sejak memasuki era pasca-reformasi, dinamika opini publik semakin kompleks seiring dengan berkembangnya ruang-ruang digital sebagai arena komunikasi politik. Media sosial dan platform digital lainnya telah merevolusi pola diseminasi informasi serta mengakselerasi terbentuknya persepsi masyarakat terhadap pemerintah (Alen, 2023; Nofiard, 2022). Meski demikian, pemetaan opini publik sering kali masih dibatasi pada pendekatan statistik atau survei kuantitatif konvensional yang cenderung mengabstraksikan konteks sosial-politik yang lebih dalam. Padahal, opini publik tidak hanya mencerminkan preferensi rasional individual, melainkan juga terbentuk dalam

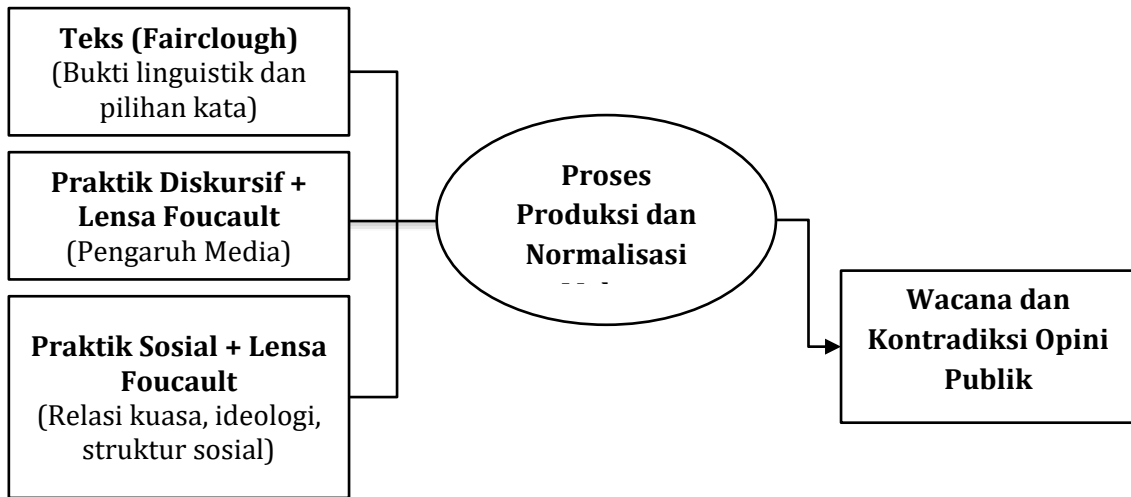
relasi kuasa dan struktur ideologis yang beroperasi melalui bahasa dan representasi (Gordon & Foucault, 1980).

Data Survei Nasional Kawula17 Kuartal II Tahun 2025 merepresentasikan sebuah fenomena sosial yang menarik untuk dikaji secara kritis. Tercatat bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah mengalami penurunan signifikan, dengan skor net keyakinan hanya mencapai 10%, terendah dalam satu tahun (Kawula17, 2025). Selain itu, muncul kontradiksi dalam persepsi masyarakat terhadap isu-isu strategis seperti ekonomi dan korupsi: 55% responden menilai kinerja ekonomi pemerintah sebagai “sangat buruk”, sementara 52% menilai penanganan korupsi juga “sangat buruk” meskipun 34% dari responden lain justru menganggap keberhasilan pemerintah dalam isu korupsi sebagai alasan utama mereka tetap percaya (Kawula17, 2025). Realitas ini menandakan adanya kompleksitas dan ketegangan wacana yang tidak dapat dijelaskan secara utuh melalui pendekatan statistik semata.

Studi-studi sebelumnya telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan peran media dalam membentuk opini (Aridho et al., 2024; Indrawan et al., 2023; Juleha et al., 2024; Nuraliza et al., 2024) meliputi ranah pemilu dan perkembangan komunikasi politik digital (Agustin & Putra, 2024; Mukhroman et al., 2024; Nurhidayat & Garis, 2023; Wulandari et al., 2023). Namun, terdapat setidaknya dua celah penting yang belum mendapat perhatian memadai. Pertama, penelitian yang ada masih dominan berfokus pada media sebagai aktor pembentuk opini, sementara representasi opini masyarakat itu sendiri dalam data survei, khususnya dari sudut pandang wacana belum dijadikan sebagai objek analisis. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Putranto (2024), respons publik dalam survei tidak dapat dilepaskan dari kerangka interpretatif dan narasi yang mereka internalisasi. Kedua, sangat jarang ditemukan penggunaan pendekatan kualitatif berbasis Analisis Wacana Kritis (AWK) dalam menelaah hasil survei opini publik. Data Kawula17 sendiri menyimpan narasi-narasi kontradiktif yang menuntut pendekatan diskursif, seperti asosiasi antara korupsi dan tuntutan hukuman mati (21% responden), serta disparitas persepsi RUU PPRT antara laki-laki dan perempuan (Kawula17, 2025). Konteks semacam ini sulit diungkap tanpa pendekatan kualitatif yang memadai.

Posisi kerangka analisis dalam penelitian ini menegaskan bahwa Analisis Wacana Kritis (AWK) model tiga dimensi Norman Fairclough digunakan sebagai kerangka utama, sedangkan konsep kuasa-pengetahuan Michel Foucault berfungsi sebagai lensa penajam yang ditempatkan terutama pada dimensi praktik diskursif dan praktik sosial. Sehingga penelitian ini tidak menempatkan Fairclough dan Foucault sebagai dua kerangka yang berjalan paralel tanpa penghubung, melainkan menyusun hubungan yang operasional, di mana Fairclough menyediakan “peta kerja” analisis (teks-praktik diskursif-praktik sosial), sementara Foucault membantu menjelaskan bagaimana suatu wacana dapat tampak wajar, sah, dan dipercaya melalui mekanisme kuasa yang bekerja dalam produksi pengetahuan politik di ruang publik.

Untuk memperjelas integrasi data pada analisis, penelitian ini menggunakan skema kerja sebagaimana Gambar 1. Skema ini memastikan bahwa penggunaan Foucault tidak sekadar kutipan konseptual, melainkan memberi fungsi yang jelas dalam menjelaskan mengapa kontradiksi penilaian publik (misalnya pada isu ekonomi dan korupsi) dapat hidup berdampingan dalam satu lanskap opini.



Gambar 1. Skema Integrasi Analisis Wacana Kritis Fairclough dan Konsep Kuasa-Pengetahuan Foucault pada Data Survei Kawula17

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Fairclough pada data sekunder dari Kawula17 Q2 2025. Tiga fokus utama akan dijadikan pijakan analisis: (1) representasi linguistik opini publik terhadap kinerja pemerintah, (2) praktik diskursif dalam produksi makna sosial dan politik, serta (3) relasi kuasa yang melatari narasi opini publik dalam isu-isu seperti korupsi, ekonomi, dan kebijakan legislasi. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi orisinal bagi literatur komunikasi politik Indonesia, khususnya dalam memahami opini publik sebagai entitas wacana yang kompleks, tidak selalu rasional, dan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial-ideologis yang melingkupinya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder Survei Nasional Kawula17 Kuartal II 2025, melibatkan 417 responden usia 17–44 tahun, dengan fokus pada bagian yang memuat opini terhadap kinerja pemerintah, khususnya isu ekonomi, korupsi, dan legislasi gender (RUU PPRT). Penelitian menyadari bahwa Analisis Wacana Kritis (AWK) pada prinsipnya ideal diterapkan pada teks utuh beserta konteks produksi yang rinci. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan bahwa objek analisis bukan “seluruh ujaran responden” secara lengkap, melainkan teks sosial yang tersedia dalam dokumen survei, yang terdiri atas dua lapis materi:

1. fragmen teks atau ungkapan publik yang ditampilkan sebagai respons terbuka atau contoh frasa representatif, misalnya “hukuman mati bagi koruptor”, “rakyat kecil makin susah”, “harga naik, gaji tetap”, dan
2. konstruksi kategorisasi dan penonjolan statistik (misalnya proporsi penilaian “sangat buruk”, kontradiksi alasan percaya/tidak percaya) yang disajikan oleh penyelenggara survei sebagai bentuk representasi resmi atas opini publik.

Dengan desain tersebut, AWK diarahkan untuk membaca survei sebagai artefak komunikasi politik: dokumen survei diperlakukan sebagai teks yang “memediasi” opini publik, bukan sekadar wadah netral angka-angka. Kerangka Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough (1992) dengan struktur tiga dimensi berikut: a) teks (*textual analysis*), Analisis linguistik terhadap respons terbuka responden, pemilihan kata, metafora, asosiasi

ide seperti “korupsi = hukuman mati”. Fokus pada bagaimana opini dikonstruksi secara tekstual dan bagaimana diksi mencerminkan nilai atau ideologi; b) praktik diskursif (*discourse practice*), Mengungkap bagaimana wacana terbentuk melalui intertekstualitas, seperti narasi media, pengalaman personal, narasi religius dan bagaimana makna diproduksi serta diedarkan misalnya, pengaruh media dan buzzer. Hal ini mencakup analisis produksi dan konsumsi teks survei; c) praktik sosial (*social practice*), Menganalisis konteks sosial-politik yang memengaruhi wacana, termasuk struktur kuasa, ideologi dominan, serta relasi kelas, gender, dan generasi. Misalnya, bagaimana persepsi terhadap RUU PPRT berbeda antara laki-laki dan perempuan mencerminkan ketimpangan struktural dalam representasi kepentingan.

Prosedur analisis dalam penelitian ini terdiri atas empat tahapan utama yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah seleksi data, yakni dengan memilih indikator survei yang memuat respons terbuka serta data yang menunjukkan kontradiksi opini, terutama pada isu-isu yang sensitif dan bernilai ideologis seperti korupsi, ekonomi, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Setelah data terpilih, tahap kedua dilakukan melalui proses koding wacana, yang mencakup klasifikasi bentuk representasi, asosiasi makna, serta identifikasi metafora dominan yang muncul dalam narasi publik. Tahap ketiga adalah analisis kontekstual, di mana temuan linguistik yang diperoleh dihubungkan dengan struktur sosial dan ideologis yang relevan untuk mengungkap posisi dan relasi kuasa yang tersembunyi dalam bahasa. Tahap terakhir adalah interpretasi kritis, yakni menelaah bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen kuasa dalam membentuk opini publik serta mempertahankan atau menantang struktur dominasi dalam masyarakat. Secara etis, penelitian ini menggunakan data sekunder tanpa identitas personal, studi ini tidak melibatkan intervensi langsung terhadap responden. Namun, interpretasi kritis dilakukan secara hati-hati untuk tidak mendiskreditkan kelompok tertentu dan tetap menjaga konteks representasi.

Kredibilitas analisis wacana tetap terjaga meskipun data bersifat sekunder dan sebagian teragregasi, di mana penelitian ini menerapkan empat strategi, sebagai berikut:

1. Transparansi batas data (*data boundary*). Penelitian menyatakan secara eksplisit bahwa analisis teks dilakukan hanya pada materi yang tersedia dalam laporan sehingga simpulan ditarik sebagai interpretasi atas “wacana yang terrepresentasi” dalam dokumen survei, bukan klaim atas keseluruhan percakapan responden yang tidak terekam.
2. Jejak audit (*audit trail*). Setiap tema diskursif ditelusurkan kembali pada bukti yang ditampilkan laporan: angka, kategori, dan frasa yang muncul lalu dipertegas dengan ungkapan yang mewakili intensitas moral.
3. Triangulasi internal antar-dimensi Fairclough. Temuan pada level teks tidak berdiri sendiri, artinya diuji konsistensinya dengan level praktik diskursif dan praktik sosial.
4. Kehati-hatian inferensial (*bounded inference*). Penelitian menghindari klaim yang tidak dapat diverifikasi oleh data, dan lebih menekankan pembacaan wacana sebagai kecenderungan makna yang tampak pada materi yang tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Membedah opini publik terhadap kinerja pemerintah Indonesia selama Kuartal II tahun 2025, survei Kawula17 menghadirkan sebuah lanskap naratif yang tidak hanya berisi preferensi politik atau ekspresi spontan masyarakat, melainkan juga mencerminkan dinamika diskursif yang kompleks dan penuh kontradiksi. Pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang diterapkan dalam penelitian ini memungkinkan penelusuran lebih dalam terhadap bagaimana bahasa dalam survei berperan dalam membentuk makna sosial, serta bagaimana opini-opini tersebut diproduksi melalui interaksi antara teks, praktik diskursif, dan struktur sosial yang melingkupinya.

Tabel 1. Proses koding data

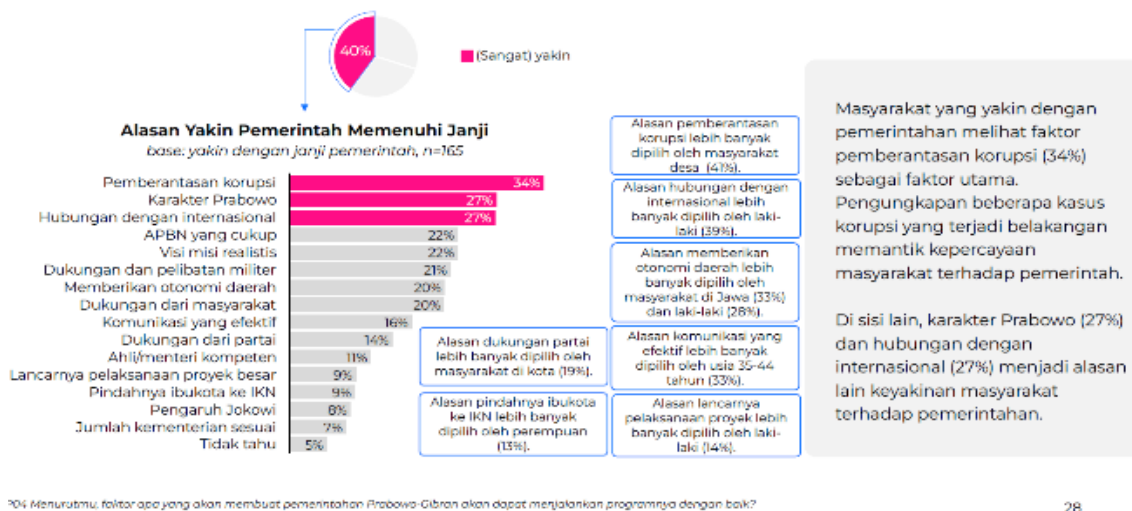
Data (unit teks/ representasi)	Kode awal	Kategori	Tema diskursif	Dimensi Fairclough	Catatan interpretatif
“hukuman mati bagi koruptor”	tuntutan hukuman ekstrem	keadilan punitif	Resistensi simbolik & krisis legitimasi hukum	Teks → Praktik sosial	Menandai moral outrage dan delegitimasi terhadap mekanisme hukum formal
“sudah capek lihat korupsi tiap hari”	kelelahan moral	delegitimasi institusi	Ambivalensi kepercayaan pada negara	Teks → Praktik diskursif	Mengarah pada normalisasi korupsi sebagai pengalaman sehari-hari
52% “korupsi sangat buruk” vs 34% “korupsi alasan percaya”	kontradiksi evaluasi	ambivalensi wacana	Opini sebagai negosiasi makna	Praktik diskursif	Angka dibaca sebagai representasi pertarungan narasi, bukan sekadar statistik

Masyarakat yang tidak yakin paling menyoroti masalah korupsi dan penyalahgunaan dana dalam pelaksanaan program pemerintah (52%)



JPO3 Menurutmu, faktor apa yang membuat pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan dapat menjalankan programnya dengan baik?

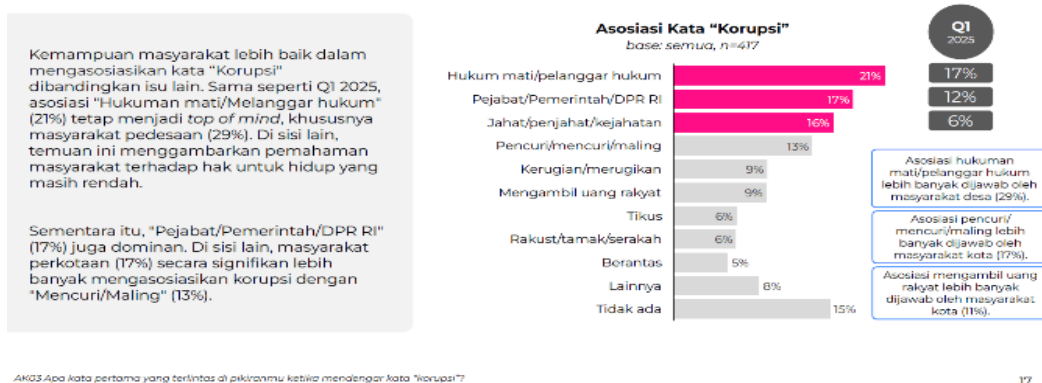
Masyarakat yang yakin dengan pemerintah melihat faktor pemberantasan korupsi (34%) dan karakter Prabowo (27%)



Gambar 1. Kontradiksi opini publik terhadap isu korupsi.
Sumber: Kawula17, Laporan Hasil NKS Q2 2025, hlm. 28-29

Salah satu temuan yang paling mencolok adalah bagaimana isu korupsi muncul sebagai medan wacana yang penuh ambivalensi. Di satu sisi, mayoritas responden (52%) mengidentifikasi kegagalan pemberantasan korupsi sebagai alasan utama ketidakpercayaan terhadap pemerintah, tetapi di sisi lain, sekelompok signifikan responden (34%) justru menjadikan keberhasilan dalam isu ini sebagai alasan keyakinan (lihat gambar 1). Fenomena ini menggambarkan bagaimana “korupsi” telah menjadi simbol diskursif yang tidak tunggal maknanya. Dalam respon terbuka, muncul frasa-frasa seperti “hukuman mati bagi koruptor” atau “sudah capek lihat korupsi tiap hari”, yang mengindikasikan bahwa korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan administratif, melainkan sebagai bentuk pengkhianatan sosial yang melukai keadilan kolektif (lihat gambar 2). Frasa-frasa tersebut juga memperlihatkan penggunaan bahasa yang ekspresif, penuh emosi, dan kadang ekstrem, yang menandakan kemarahan publik sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap ketidakadilan sistemik.

Masyarakat paling banyak mengasosiasikan 'korupsi' dengan hukuman mati (21%), diikuti oleh pejabat (17%) dan kejahatan (16%)

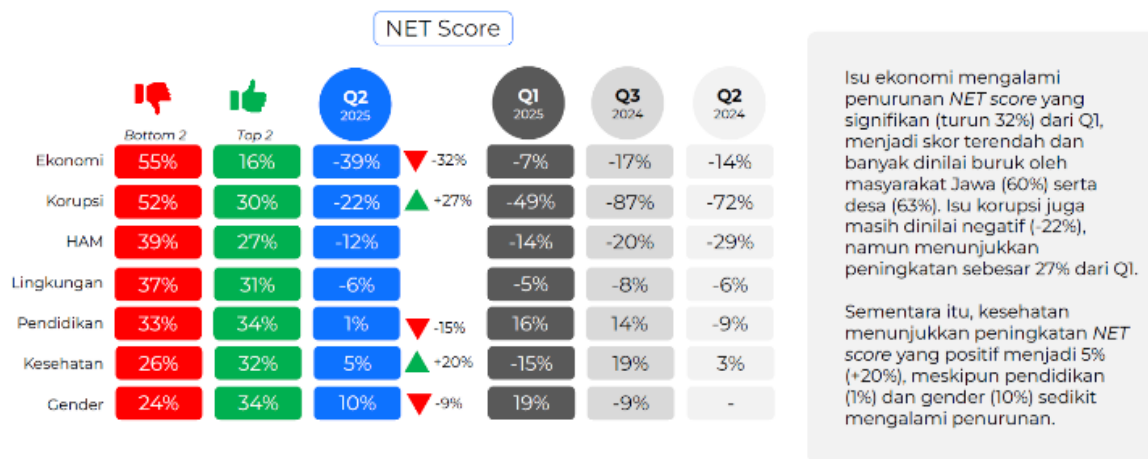


Gambar 2. Asosiasi responden terhadap isu korupsi-“Hukuman Mati” sebagai respons dominan (21%).
Sumber: Kawula17, Laporan Hasil NKS Q2 2025, hlm. 17

Namun, resistensi ini bukanlah sesuatu yang muncul secara alami atau spontan, melainkan dibentuk oleh praktik diskursif yang bekerja melalui media massa dan media sosial. Narasi tentang korupsi yang dikonstruksi media kerap bersifat dramatik, menyoroti aksi OTT, vonis terhadap tokoh publik, atau skandal politik dalam format yang sensasional. Representasi tersebut menciptakan semacam intertekstualitas di benak publik, yang kemudian direproduksi dalam respons survei mereka. Dalam kerangka Fairclough (1992) hal ini mencerminkan bahwa produksi opini dalam survei bukanlah representasi murni dari pikiran individu, melainkan hasil dari sirkulasi makna yang telah dinormalisasi dalam ruang publik. Sementara itu, Foucault (1980) menegaskan bahwa praktik diskursif seperti ini merupakan bagian dari “*regime of truth*”, yakni sistem yang menentukan apa yang boleh dikatakan dan dipercayai oleh masyarakat. Maka, ketika publik menyuarakan “hukuman mati bagi koruptor”, mereka sedang mengartikulasikan bentuk kebenaran moral yang dibentuk dalam struktur kuasa yang lebih luas.

Isu lain yang tidak kalah signifikan adalah persepsi masyarakat terhadap ekonomi. Sebanyak 55% responden menilai kinerja ekonomi pemerintah sebagai “sangat buruk” (lihat gambar 3), dan respons terbuka menunjukkan keluhan terkait harga bahan pokok, pengangguran, dan kesenjangan kesejahteraan (lihat gambar 4). Diksi seperti “rakyat kecil makin susah” atau “harga naik, gaji tetap” menyiratkan konstruksi wacana yang menempatkan publik sebagai subjek yang eksklusif dari narasi pembangunan. Pilihan kata “rakyat kecil” mengindikasikan posisi subordinat, dan secara linguistik membentuk oposisi biner antara “kami” sebagai korban dan “mereka” sebagai elite penguasa. Dalam perspektif Fairclough, ini adalah ekspresi ideologis yang mengandung resistensi terhadap struktur sosial dominan, di mana bahasa menjadi instrumen untuk memperjuangkan klaim keadilan ekonomi.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi menurun tajam (-32%) apabila dibandingkan dengan Q1 2025



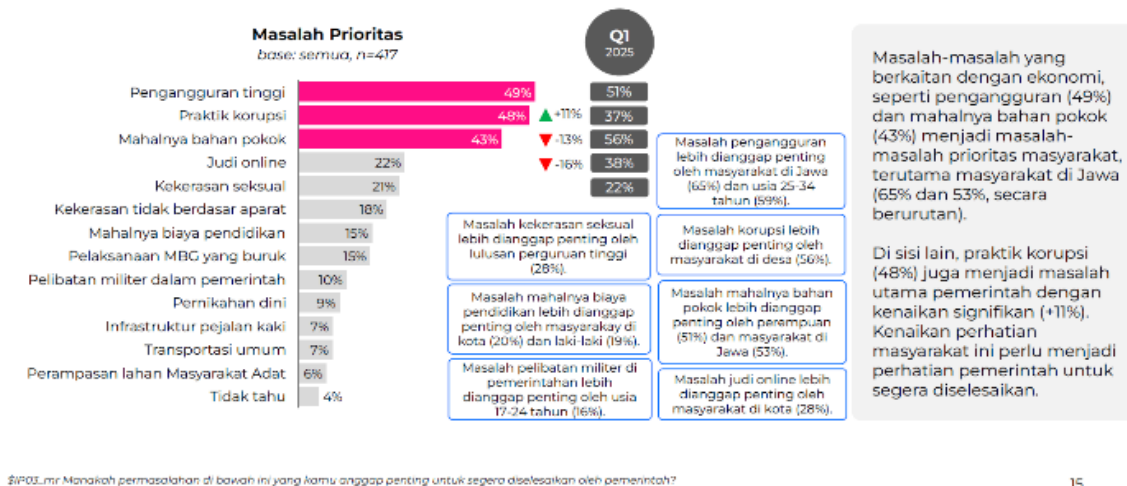
Seberapa baik kinerja pemerintah pusat saat ini dalam melaksanakan topik-topik berikut?

25

Gambar 3. Penilaian masyarakat terhadap kinerja ekonomi pemerintah – 55% menilai sangat buruk; skor net ekonomi: -32% .

Sumber: Kawula17, Laporan Hasil NKS Q2 2025, hlm. 25

Pengangguran tinggi (49%), maraknya praktik korupsi (48%), dan mahal nya harga bahan pokok (43%) merupakan tiga masalah utama pemerintah



Gambar 4. Persepsi publik terhadap permasalahan ekonomi – “pengangguran tinggi” (49%) dan “mahal nya harga bahan pokok” (43%) sebagai masalah utama.
Sumber: Kawula17, Laporan Hasil NKS Q2 2025, hlm. 15

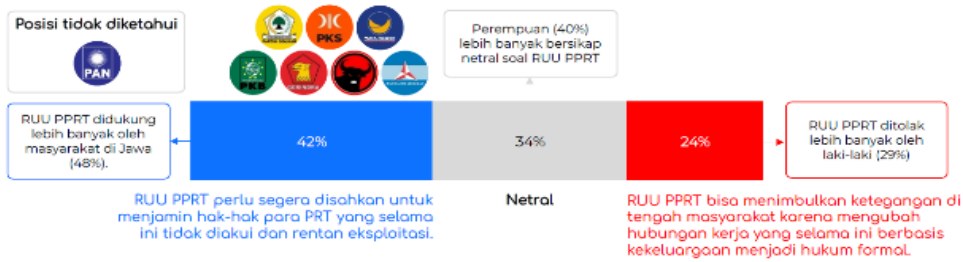
Diskursus ketimpangan ini, sama seperti dalam isu korupsi, juga merupakan hasil dari praktik produksi dan sirkulasi makna yang bersifat kolektif. Video viral tentang kelangkaan beras, narasi selektif bantuan sosial, atau kampanye politik tentang subsidi adalah bagian dari lingkungan diskursif yang memengaruhi konstruksi realitas publik. Dalam praktik sosialnya, wacana tentang ekonomi memperlihatkan ketegangan antara narasi negara yang menekankan “pertumbuhan ekonomi” dan pengalaman sehari-hari masyarakat yang merasakan stagnasi penghasilan dan inflasi harga. Diskrepansi ini mengindikasikan adanya krisis representasi dalam komunikasi politik negara, di mana narasi resmi negara tidak lagi mampu menjangkau pengalaman simbolik masyarakat bawah.

Ketegangan semacam ini juga tercermin dalam isu legislasi dan gender, khususnya terkait sikap terhadap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Data survei menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam memandang urgensi pengesahan RUU ini. Mayoritas perempuan menyatakan dukungan kuat, sedangkan sebagian besar laki-laki memilih “netral” atau menolak dengan alasan seperti “bukan isu prioritas” atau “cuma urusan rumah tangga”. Representasi semacam ini memperlihatkan ketimpangan dalam distribusi makna dan kepentingan. Perempuan menggunakan diksi yang menekankan agensi dan keadilan, seperti “kami juga manusia” atau “bukan pembantu, tapi pekerja”, sementara narasi laki-laki cenderung mengerdilkan makna kerja domestik ke dalam ranah privat dan tidak politis.

Dalam perspektif wacana kritis, narasi laki-laki tersebut merupakan manifestasi dari struktur patriarki yang terinternalisasi dalam praktik bahasa. Media jarang membahas RUU PPRT secara mendalam, dan ketika dibahas pun sering kali dari sudut pandang legal formal atau aktivisme, bukan dari representasi pekerja itu sendiri. Hal ini menyebabkan kurangnya legitimasi simbolik terhadap isu tersebut di ruang publik. Dalam model Fairclough, respons-respons ini mencerminkan bagaimana praktik diskursif dan praktik sosial membentuk posisi ideologis masyarakat, di mana wacana domestik masih dianggap berada di luar ranah kebijakan negara. Sementara itu, Gordon & Foucault (1980) mengingatkan bahwa pembatasan wacana seperti, menganggap kerja rumah tangga bukan bagian dari diskursus

politik justru adalah bagian dari mekanisme kuasa yang menyembunyikan ketimpangan sosial di balik normalisasi.

RUU PPRT didukung oleh sebagian besar masyarakat



RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia. Beberapa poin penting dalam RUU ini adalah:

1. **Pengakuan dan Perlindungan:** RUU ini mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, upah yang adil, dan kondisi kerja yang layak.
2. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** RUU ini mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan hak-hak pekerja rumah tangga terlindungi.

RUU ini telah lama diperjuangkan dan masih dalam tahap pembahasan. Banyak pihak mendesak agar RUU ini segera disahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

P02 Pilih pernyataan yang paling kamu setuju di bawah ini.
*Sikap dan posisi partai per 28 Mei 2025

Gambar 5. Sikap masyarakat terhadap RUU PPRT – laki-laki lebih banyak menolak (29%) dibanding perempuan yang cenderung netral (40%).

Sumber: Kawula17, Laporan Hasil NKS Q2 2025, hlm. 51

Ketiga isu utama ini; korupsi, ekonomi, dan legislasi gender, menunjukkan bahwa opini publik sebagaimana tercermin dalam survei Kawula17 bukanlah sekadar agregat angka, melainkan produk diskursif yang sarat dengan makna, emosi, dan ideologi. Bahasa yang digunakan oleh responden, baik dalam bentuk pilihan kata, struktur kalimat, maupun asosiasi makna, memperlihatkan bagaimana opini publik terbentuk dalam relasi kuasa yang kompleks. Fairclough menekankan bahwa bahasa tidak netral; ia adalah bentuk tindakan sosial yang sekaligus mencerminkan dan membentuk struktur sosial itu sendiri. Pendekatan analisis wacana kritis memungkinkan pembacaan ulang terhadap hasil survei sebagai medan pertarungan makna, di mana masyarakat tidak hanya menilai pemerintah, tetapi juga menegosiasikan posisi mereka dalam struktur sosial-politik yang ada.

Oleh karena itu bagian ini menunjukkan bahwa untuk memahami opini publik secara substantif, kita harus melampaui analisis kuantitatif konvensional. Respons-respons dalam survei bukan hanya data, melainkan juga teks sosial yang memuat ideologi, pengalaman, dan aspirasi. Analisis wacana kritis membantu mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi dalam respons tersebut, sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengartikulasikan posisi mereka terhadap negara, kebijakan, dan sesama warga negara. Studi ini memperkuat argumen bahwa survei publik, jika dibaca secara kritis, dapat menjadi jendela penting untuk memahami lanskap ideologis dan praksis sosial dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik terhadap kinerja pemerintah Indonesia pada Kuartal II 2025, sebagaimana terekam dalam survei Kawula17, bukanlah kumpulan data kuantitatif netral semata, melainkan konstruksi wacana yang merefleksikan relasi kuasa, ideologi, dan krisis representasi dalam masyarakat. Dengan menggunakan

pendekatan Analisis Wacana Kritis model Fairclough, studi ini berhasil mengungkap bahwa respons publik terhadap isu-isu seperti korupsi, ekonomi, dan legislasi gender mengandung struktur linguistik yang menggambarkan posisi sosial, emosi kolektif, dan resistensi simbolik terhadap narasi negara.

Isu korupsi, misalnya, muncul sebagai medan diskursif yang ambivalen: sebagian besar masyarakat mengaitkannya dengan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, namun pada saat yang sama, sekelompok besar responden justru menilai pemberantasan korupsi sebagai capaian positif. Frasa seperti “hukuman mati bagi koruptor” mencerminkan ekspresi ketidakpercayaan sekaligus bentuk simbolik tuntutan keadilan yang tidak diperoleh melalui mekanisme hukum formal. Dalam dimensi wacana, hal ini menunjukkan adanya delegitimasi terhadap institusi negara, dan munculnya bahasa populis sebagai alat ekspresi ketegangan sosial.

Dalam isu ekonomi, narasi publik tidak hanya mengkritik kebijakan atau hasil kinerja, tetapi mengonstruksi oposisi ideologis antara “rakyat kecil” dan “pemerintah”. Bahasa yang digunakan masyarakat menunjukkan posisi subjek yang tereksklusi dari wacana pembangunan. Wacana ini diperkuat oleh praktik diskursif media sosial yang menyebarkan pengalaman individual sebagai bagian dari narasi kolektif. Hal ini mengindikasikan krisis komunikasi politik yang tidak mampu menjembatani retorika negara dengan pengalaman konkret warga.

Isu RUU PPRT memperlihatkan bagaimana struktur sosial berbasis gender mewarnai persepsi publik. Perbedaan sikap antara laki-laki dan perempuan terhadap urgensi perlindungan pekerja domestik menunjukkan bahwa wacana legislasi tidak hanya diukur dari logika hukum, tetapi juga dari struktur nilai dan ideologi patriarkal yang telah terinternalisasi. Diskursus perempuan dalam data survei memuat bahasa yang menuntut pengakuan dan perlindungan, sedangkan sebagian laki-laki menempatkan isu ini sebagai “tidak penting”, mencerminkan penolakan simbolik terhadap perubahan relasi kuasa domestik.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini publik yang terekam dalam survei dapat dan perlu dibaca sebagai teks sosial yang merefleksikan kondisi sosial-politik masyarakat. Pendekatan AWK tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap isi survei, tetapi juga mengungkap lapisan makna yang tersembunyi di balik angka-angka: siapa yang berbicara, dalam kondisi sosial seperti apa, dengan bahasa bagaimana, dan untuk kepentingan siapa. Oleh karena itu, analisis opini publik dalam studi komunikasi politik tidak dapat dilepaskan dari kajian diskursif yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, K. Y., & Putra, D. K. S. (2024). Relevansi teori agenda setting pada film dokumenter *Dirty Vote* terhadap warga Bandung menjelang Pilpres 2024. *EProceedings of Management*, 11(6).
- Alen, N. P. (2023). Transformasi media sosial dalam kompetensi komunikasi politik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 5101–5109.
- Aridho, A., Situmeang, T. A., Tinambunan, D. R., Ramadhani, K. N., Lase, M. W., & Ivanna, J. (2024). Peran media massa dalam membentuk opini publik: Demokratisasi pasca-

reformasi. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 206–210.

Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity Press.

Gordon, C., & Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.

Indrawan, J., Barzah, R. E., & Simanihuruk, H. (2023). Instagram sebagai media komunikasi politik bagi generasi milenial. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 170–179.

Juleha, J., Yuniar, J., & Marsuki, N. R. (2024). Peran media sosial dalam dinamika opini publik dan partisipasi politik era digital. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 38–45.

Kawula17. (2025, June 4). *Laporan hasil survei nasional Kawula17: Kuartal II tahun 2025*. Yayasan Pelopor Pilihan 17.

Mukhroman, I., Ahmad, I., & Gumelar, R. G. (2024). Pembentukan opini publik pada pemilihan umum 2024: Studi kasus survei elektabilitas capres–cawapres pasca debat pertama. *Syntax Idea*, 6(6), 2471–2482.

Nofiard, F. (2022). Komunikasi politik digital di Indonesia. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 10(2), 31–40.

Nuraliza, V., Rahmadi, A. N., Mubaroq, A., Kristiyono, K., Melani, A. P., & Ifana, A. (2024). Peran komunikasi politik dalam membentuk opini publik menghadapi Pemilu 2024. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(1), 245–261.

Nurhidayat, I., & Garis, R. R. (2023). Tren komunikasi politik di media sosial. *Jurnal Lanskap Politik*, 1(2), 1–24.

Putranto, A. (2024). *Komunikasi politik*. Cendikia Mulia Mandiri.

Sarihati, T., Luthfie, H. M., & Kurniadi, B. (2022). *Komunikasi politik, media massa, dan opini publik*. PT RajaGrafindo Persada.

Wulandari, C. D., Muqsith, M. A., & Ayuningtyas, F. (2023). Fenomena buzzer di media sosial jelang Pemilu 2024 dalam perspektif komunikasi politik. *Avant Garde*, 11(1), 134.